

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Pendidikan Anti Korupsi
KODE MK	:	3KKFS202
SEMESTER	:	2

Tim Penyusun:

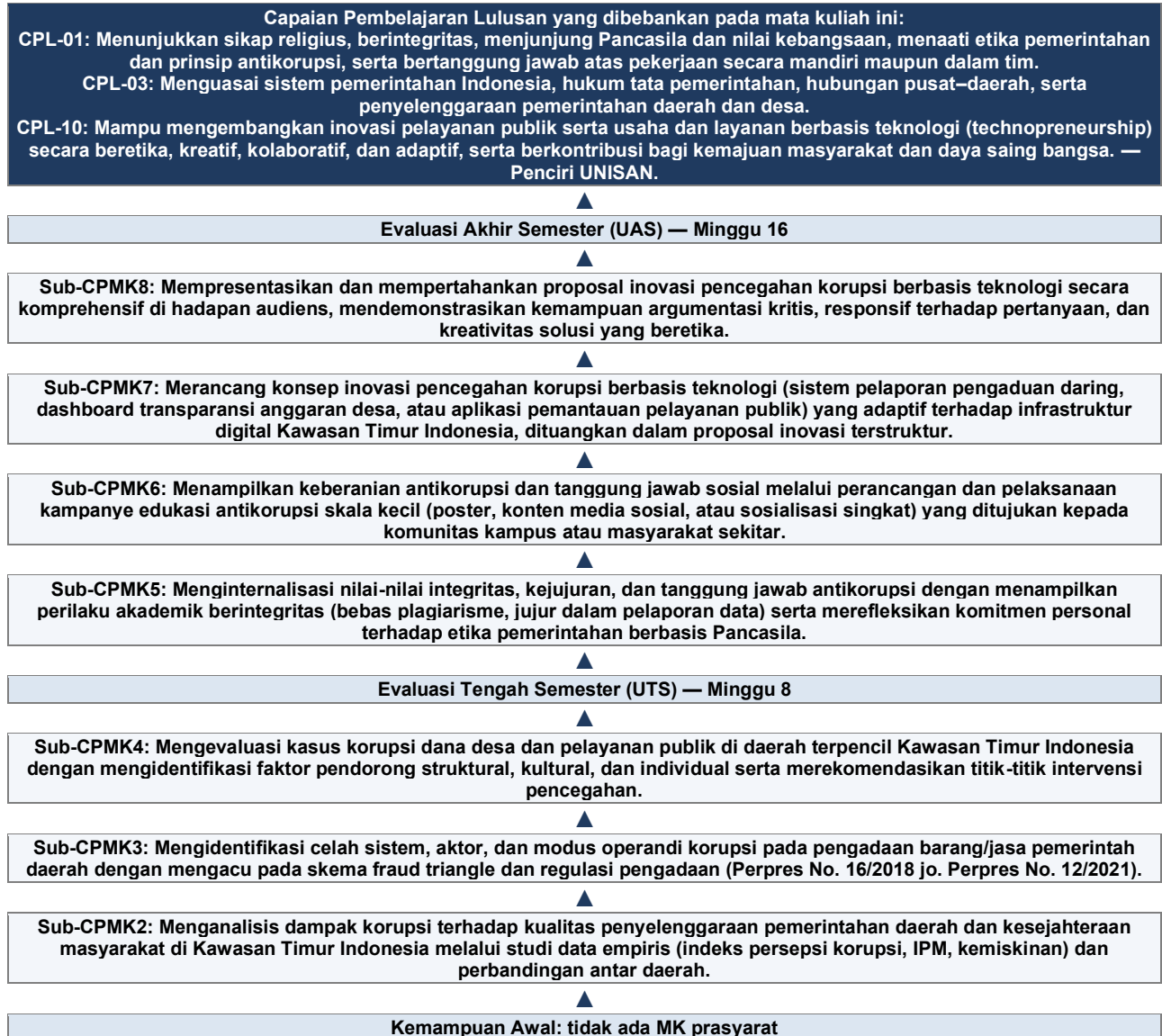
Hasan Bau, S.E., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3KKFS202	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pendidikan Anti Korupsi		3KKFS202	MKWF	T=2	P=0	2	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Hasan Bau, S.E., M.Si. NIDN. 0911038704	 Hasan Bau, S.E., M.Si. NIDN. 0911038704		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.					
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-10	Mampu mengembangkan inovasi pelayanan publik serta usaha dan layanan berbasis teknologi (technopreneurship) secara beretika, kreatif, kolaboratif, dan adaptif, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan daya saing bangsa. — Penciri UNISAN.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar korupsi, tipologi, dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan kerangka hukum dan regulasi antikorupsi yang berlaku.					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus korupsi nyata pada sektor pemerintahan daerah dan desa—mencakup pengadaan barang/jasa, dana desa, dan pelayanan publik—dengan mengidentifikasi celah sistem, aktor, dan modus operandi secara kritis dan berbasis bukti.					
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menginternalisasi dan menampilkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian antikorupsi dalam sikap serta perilaku akademik dan kehidupan bermasyarakat sebagai wujud komitmen terhadap Pancasila dan etika pemerintahan.					

	CPMK-4	Mahasiswa mampu merancang strategi atau prototipe inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi (mis. sistem pelaporan pengaduan daring, dashboard transparansi anggaran desa, atau aplikasi pemantauan pelayanan publik) yang beretika, adaptif, dan kontekstual bagi kebutuhan tata kelola pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia, disajikan dalam bentuk proposal inovasi tertulis beserta presentasi.			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar korupsi, tipologi (suap, gratifikasi, penggelapan, kolusi, nepotisme), dan kerangka hukum antikorupsi Indonesia (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, UNCAC) beserta contoh kasus dari Kawasan Timur Indonesia.			
	Sub-CPMK2	Menganalisis dampak korupsi terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia melalui studi data empiris (indeks persepsi korupsi, IPM, kemiskinan) dan perbandingan antar daerah.			
	Sub-CPMK3	Mengidentifikasi celah sistem, aktor, dan modus operandi korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dengan mengacu pada skema fraud triangle dan regulasi pengadaan (Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021).			
	Sub-CPMK4	Mengevaluasi kasus korupsi dana desa dan pelayanan publik di daerah terpencil Kawasan Timur Indonesia dengan mengidentifikasi faktor pendorong struktural, kultural, dan individual serta merekomendasikan titik-titik intervensi pencegahan.			
	Sub-CPMK5	Menginternalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab antikorupsi dengan menampilkan perilaku akademik berintegritas (bebas plagiarisme, jujur dalam pelaporan data) serta merefleksikan komitmen personal terhadap etika pemerintahan berbasis Pancasila.			
	Sub-CPMK6	Menampilkan keberanian antikorupsi dan tanggung jawab sosial melalui perancangan dan pelaksanaan kampanye edukasi antikorupsi skala kecil (poster, konten media sosial, atau sosialisasi singkat) yang ditujukan kepada komunitas kampus atau masyarakat sekitar.			
	Sub-CPMK7	Merancang konsep inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi (sistem pelaporan pengaduan daring, dashboard transparansi anggaran desa, atau aplikasi pemantauan pelayanan publik) yang adaptif terhadap infrastruktur digital Kawasan Timur Indonesia, dituangkan dalam proposal inovasi terstruktur.			
	Sub-CPMK8	Mempresentasikan dan mempertahankan proposal inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi secara komprehensif di hadapan audiens, mendemonstrasikan kemampuan argumentasi kritis, responsif terhadap pertanyaan, dan kreativitas solusi yang beretika.			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
	Sub-CPMK1	√	—	—	—
	Sub-CPMK2	√	—	—	—
	Sub-CPMK3	—	√	—	—
	Sub-CPMK4	—	√	—	—
	Sub-CPMK5	—	—	√	—
	Sub-CPMK6	—	—	√	—
	Sub-CPMK7	—	—	—	√

	<table><tr><td>Sub-CPMK8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Sub-CPMK8	—	—	—	√	Jumlah	2	2	2	2																																																						
Sub-CPMK8	—	—	—	√																																																													
Jumlah	2	2	2	2																																																													
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																																																
	<table><tr><td></td><td>CPL-01 (%)</td><td>CPL-03 (%)</td><td>CPL-10 (%)</td><td>Bobot penilaian (%)</td><td>Jumlah Minggu</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>8</td><td>7</td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>8</td><td>7</td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td>7</td><td></td><td></td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>14</td><td></td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td>7</td><td></td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td>4</td><td></td><td>3</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>48</td><td>42</td><td>10</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>						CPL-01 (%)	CPL-03 (%)	CPL-10 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	8	7		15	2	Sub-CPMK2	8	7		15	2	Sub-CPMK3		14		14	2	Sub-CPMK4		14		14	2	Sub-CPMK5	7			7	1	Sub-CPMK6	14			14	2	Sub-CPMK7	7		7	14	2	Sub-CPMK8	4		3	7	1		48	42	10	100	14
	CPL-01 (%)	CPL-03 (%)	CPL-10 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																																												
Sub-CPMK1	8	7		15	2																																																												
Sub-CPMK2	8	7		15	2																																																												
Sub-CPMK3		14		14	2																																																												
Sub-CPMK4		14		14	2																																																												
Sub-CPMK5	7			7	1																																																												
Sub-CPMK6	14			14	2																																																												
Sub-CPMK7	7		7	14	2																																																												
Sub-CPMK8	4		3	7	1																																																												
	48	42	10	100	14																																																												
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (2 SKS) membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual, kemampuan analisis kritis, dan komitmen sikap untuk mengenali, mencegah, serta melawan praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada konteks pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia. Mata kuliah ini berkedudukan sebagai penguat karakter dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan UNISAN, menjembatani bahan kajian hukum, kelembagaan, dan birokrasi pemerintahan (BK-03) dengan bahan kajian etika, integritas, kebangsaan, dan technopreneurship (BK-12) sebagai penciri institusional. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning) dan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), mahasiswa secara progresif bergerak dari penguasaan kerangka hukum dan tipologi korupsi, menuju analisis kasus nyata pada sektor pengadaan barang/jasa, dana desa, dan pelayanan publik, hingga perancangan prototipe inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi yang diwujudkan dalam bentuk proposal inovasi tertulis beserta presentasi. Relevansi mata kuliah ini terhadap CPL yang dibebankan mencakup penguatan sikap integritas dan nilai Pancasila (CPL-01), penguasaan sistem hukum dan tata pemerintahan sebagai landasan analisis (CPL-03), serta pengembangan inovasi layanan publik berbasis technopreneurship secara etis dan adaptif (CPL-10) sebagai wujud kontribusi nyata mahasiswa bagi kemajuan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kawasan Timur Indonesia.																																																																
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar dan tipologi korupsi; 2. Dampak korupsi terhadap tata kelola pemerintahan; 3. Kerangka hukum dan regulasi antikorupsi Indonesia; 4. Kelembagaan antikorupsi: KPK, BPKP, Ombudsman;																																																																

	5. Birokrasi pemerintahan dan celah sistemik korupsi; 6. Korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; 7. Korupsi dana desa dan pelayanan publik di KTI; 8. Analisis kasus korupsi berbasis bukti; 9. Nilai integritas, kejujuran, dan keberanian antikorupsi; 10. Etika pemerintahan dan komitmen Pancasila; 11. Teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas publik; 12. Perancangan prototipe inovasi pencegahan korupsi.						
Pustaka	Utama :						
	(1) Pope, J. (2000). Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System. Transparency International; (2) Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press; (3) Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Edisi ke-2. Cambridge University Press; (4) Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. Edisi ke-4. KPK RI; (5) United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention Against Corruption. UNODC.						
	Pendukung :						
	(1) Komisi Pemberantasan Korupsi. 2021. Modul Integritas: Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. KPK RI; (2) Transparency International. 2023. Corruption Perceptions Index 2023. Transparency International; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; (5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023. Laporan Hasil Pengawasan Nasional atas Pengelolaan Dana Desa. BPKP RI.						
Dosen Pengampu	Hasan Bau, S.E., M.Si.						
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dasar korupsi, tipologi (suap, gratifikasi, penggelapan, kolusi,	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan menampilkan peta	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pengantar (10-15	Bahan Kajian: • Definisi korupsi menurut UU No. 31/1999	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	nepotisme), dan kerangka hukum antikorupsi Indonesia (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, UNCAC) beserta contoh kasus dari Kawasan Timur Indonesia.	• Mendefinisikan korupsi berdasarkan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan UNCAC dengan bahasa sendiri secara tepat • Membedakan lima tipologi korupsi (suap, gratifikasi, penggelapan, kolusi, nepotisme) berdasarkan unsur hukum dan contoh faktual • Mengidentifikasi minimal tiga contoh kasus korupsi dari Kawasan Timur Indonesia dan mengklasifikasikannya ke dalam tipologi yang sesuai • Menjelaskan hierarki kerangka hukum antikorupsi Indonesia: UU No. 31/1999, UU No. 20/2001, dan	Kuis identifikasi tipologi: diberikan deskripsi singkat skenario korupsi, mahasiswa menentukan tipologi yang tepat beserta pasal yang dilanggar; dinilai berdasarkan ketepatan klasifikasi dan rujukan pasal Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan berbasis fakta selama sesi pemetaan kasus; kesesuaian sikap akademik dengan nilai Integrity (tidak mencontek, menyebut sumber	sebaran kasus korupsi KTI (berbasis data ICW atau putusan MA yang tersedia publik), menjelaskan kerangka hukum secara sistematis, lalu memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk mengklasifikasikan kasus ke dalam tipologi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa duduk dalam kelompok 4-5 orang, menerima kartu kasus (dicetak dosen), mendiskusikan tipologi dan pasal yang dilanggar, kemudian mempresentasikan hasil secara singkat (gallery walk) di depan kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: tiap kelompok menganalisis satu kasus korupsi berbeda dari KTI, mengisi tabel	menit) yang memaparkan definisi korupsi lintas perspektif hukum dan sosial beserta infografis tipologi lima kategori ke LMS UNISAN sebelum sesi tatap muka (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video, mengunduh slide dan ringkasan regulasi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan UNCAC) dari LMS, lalu mengisi lembar refleksi awal tentang persepsi pribadi terhadap korupsi di lingkungan sekitar MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah penggalan berita atau kutipan putusan kasus korupsi KTI yang diunggah dosen di forum LMS, kemudian	jo. UU No. 20/2001 dan UNCAC; • Tipologi korupsi: suap, gratifikasi, penggelapan, kolusi, nepotisme; • Kerangka hukum antikorupsi Indonesia: hierarki regulasi; • Contoh kasus korupsi dari Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Klitgaard (1988); Rose-Ackerman & Palifka (2016); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); United Nations Office on Drugs and Crime (2004).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ratifikasi UNCAC melalui UU No. 7/2006	secara jujur) Tugas: Lembar identifikasi kasus: mahasiswa memilih satu kasus korupsi di KTI yang dipublikasikan media atau putusan pengadilan, mengisi tabel tipologi, pasal yang dilanggar, dan pelaku/korban; panjang 1 halaman A4	klasifikasi tipologi, dan memberikan umpan balik lisan kepada kelompok lain; dosen meluruskan miskonsepsi di akhir sesi Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu memilih satu kasus korupsi yang telah mendapat putusan pengadilan atau liputan berita kredibel di provinsi Kawasan Timur Indonesia (Papua, Maluku, NTT, NTB, Sulawesi, atau Kalimantan), kemudian mengisi tabel analisis tipologi yang mencakup: nama kasus, tahun, lokasi, tipologi korupsi sesuai UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, pasal yang dikenakan, pihak yang dirugikan, dan estimasi kerugian negara. Mahasiswa wajib menyertakan URL atau sumber rujukan yang dapat diverifikasi. Jika	merespons pertanyaan pandu (tipologi apa, pasal mana, siapa dirugikan) secara asinkron sebelum kelas luring Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menggunakan bantuan Generative AI untuk menelusuri informasi, mahasiswa wajib menyertakan deklarasi penggunaan AI pada bagian akhir lembar tugas. Deliverable: Tabel analisis tipologi kasus korupsi KTI (1 halaman A4, format yang disediakan di LMS) diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 2			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis analisis regulasi: mahasiswa diberikan skenario laporan gratifikasi dan diminta menentukan kewajiban pelaporan berdasarkan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mempresentasikan peta regulasi antikorupsi Indonesia secara sistematis (dari UU induk, peraturan turunan, hingga kewenangan KPK), kemudian memfasilitasi sesi bedah kasus pelaporan gratifikasi menggunakan studi kasus autentik dari portal LHKPN KPK (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah modul bacaan regulasi terpilih (kutipan pasal UNCAC dan UU antikorupsi yang relevan) beserta panduan pengisian matriks komparasi ke LMS UNISAN; dosen membuka forum diskusi daring untuk tanya jawab tentang tabel tipologi yang dikumpulkan pada	Bahan Kajian: • Kerangka hukum antikorupsi Indonesia: UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan peraturan turunan; • Prinsip dan pilar UNCAC: pencegahan, kriminalisasi, pemulihan aset, kerja sama internasional;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peraturan KPK No. 2/2019, batas waktu, dan konsekuensi hukum; dinilai berdasarkan ketepatan rujukan pasal dan logika argumentasi Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi kelompok analisis regulasi: kedalaman argumen berbasis teks regulasi, kemampuan mendengarkan pendapat berbeda, dan ketaatan terhadap etika diskusi akademik sebagai wujud nilai Harmony dan Integrity Tugas:	Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan matriks komparasi dalam kelompok, menggunakan laptop untuk mengakses portal JDIH Online dan situs KPK secara langsung; tiap kelompok mempresentasikan satu pilar UNCAC dan kaitannya dengan regulasi Indonesia kepada kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menganalisis satu skenario gratifikasi berbasis kasus nyata KTI, menentukan pasal yang berlaku, dan merumuskan rekomendasi prosedur pelaporan yang sesuai Peraturan KPK No. 2/2019; presentasi diakhiri dengan umpan balik dosen Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.	Minggu 1 (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca modul regulasi, mengakses portal JDIH Online untuk menelusuri teks lengkap UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan Peraturan KPK No. 2/2019, serta mulai mengisi draft matriks komparasi secara mandiri sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah kasus nyata pelaporan atau penolakan gratifikasi oleh pejabat publik di KTI yang disediakan dosen di LMS, kemudian mengidentifikasi pasal yang relevan dan mengunggah temuan	• Mekanisme pelaporan gratifikasi berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019; • Kelembagaan penegakan antikorupsi: KPK, kejaksaan, kepolisian; Pustaka: United Nations Office on Drugs and Crime (2004); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Rose-Ackerman & Palifka (2016); Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Matriks komparasi regulasi: tabel 2 halaman A4 yang membandingkan ketentuan UNCAC dengan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 pada empat pilar (pencegahan, kriminalisasi, pemulihan aset, kerja sama) disertai catatan gap implementasi di KTI	Tugas: Secara berkelompok (4-5 orang), mahasiswa menyusun matriks komparasi antara ketentuan UNCAC dan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 pada empat pilar: pencegahan, kriminalisasi, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. Tiap sel matriks diisi dengan kutipan pasal, deskripsi singkat ketentuan, dan catatan gap implementasi di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan berita atau dokumen publik yang dapat diverifikasi. Matriks dilengkapi dengan paragraf kesimpulan (maks. 200 kata) tentang kekuatan dan kelemahan kerangka hukum antikorupsi Indonesia. Deklarasi penggunaan AI wajib disertakan bila digunakan dalam proses penyusunan.	awal ke forum diskusi daring Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Matriks komparasi regulasi (2 halaman A4, format tabel) beserta paragraf kesimpulan, diunggah ke LMS UNISAN dalam format PDF paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 3			
3,4	Sub-CPMK2: Menganalisis dampak korupsi terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia melalui studi data empiris (indeks persepsi korupsi, IPM, kemiskinan) dan perbandingan antar daerah.	Mahasiswa mampu: • Menganalisis hubungan antara skor Corruption Perceptions Index (CPI) daerah dengan indikator kualitas tata kelola pemerintahan (efektivitas pemerintahan, akuntabilitas) di provinsi KTI • Menginterpretasikan data empiris (CPI, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan) untuk menjelaskan mekanisme transmisi	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Analisis data terpandu: mahasiswa diberikan tabel data CPI dan IPM lima provinsi KTI, kemudian diminta menginterpretasikan pola korelasi dan menjelaskan satu mekanisme transmisi korupsi-kemiskinan; dinilai berdasarkan ketepatan interpretasi data	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mempresentasikan kerangka analisis dampak korupsi terhadap tata kelola (menggunakan model Klitgaard $C=M+D-A$ dan konsep Rose-Ackerman tentang biaya sosial korupsi), kemudian memimpin sesi analisis data bersama menggunakan proyektor untuk menampilkan grafik CPI-IPM-kemiskinan KTI (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok 4-5 orang menganalisis data tabel	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan pengumpulan data CPI (Transparency International 2023), data IPM (BPS), dan data kemiskinan (BPS) ke LMS beserta template tabel komparasi antar provinsi KTI; dosen memberikan umpan balik tertulis atas matriks regulasi yang dikumpulkan pada Minggu 2 (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses portal Transparency	Bahan Kajian: • Mekanisme transmisi korupsi ke penurunan kualitas tata kelola pemerintahan; • Corruption Perceptions Index (CPI) sebagai instrumen pengukuran persepsi korupsi daerah; • Data empiris: IPM, kemiskinan, dan efektivitas pemerintahan di provinsi KTI; • Perbandingan dampak korupsi pada pemerintahan pusat dan daerah;	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		korupsi ke penurunan kualitas layanan publik • Membedakan dampak korupsi pada tata kelola pemerintahan pusat versus daerah berdasarkan bukti data komparatif antar provinsi di KTI • Merumuskan argumen berbasis data tentang mengapa pemberantasan korupsi merupakan prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat di KTI (nilai Nationalism dan Service)	dan kualitas penalaran kausal Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi analisis data: kemampuan membaca grafik/tabel secara kritis, memberikan interpretasi berbasis bukti, dan menghargai perspektif rekan dari latar belakang daerah berbeda di KTI sebagai wujud nilai Harmony Tugas: Memo analisis data empiris: dokumen 2 halaman A4 yang memuat tabel data CPI-IPM-kemiskinan	yang telah mereka kumpulkan secara daring, menyusun argumen kausal korupsi-kemiskinan, dan mempresentasikan temuan kelompok menggunakan visualisasi data sederhana (grafik/diagram) kepada kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis data empiris: tiap kelompok ditugaskan menganalisis satu provinsi KTI secara mendalam (CPI, IPM, kemiskinan, kasus korupsi terdokumentasi), kemudian membandingkan temuan antar kelompok untuk mengidentifikasi pola regional; dosen memfasilitasi sintesis di akhir sesi Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas:	International untuk mengunduh CPI 2023, portal BPS untuk data IPM dan kemiskinan per provinsi KTI, kemudian mengisi template tabel komparasi secara mandiri sebagai bahan diskusi kelas luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis data: mahasiswa menelaah laporan CPI dan data IPM provinsi KTI yang disiapkan dosen, mengidentifikasi tiga provinsi dengan skor CPI terendah, dan mengunggah temuan awal ke forum LMS untuk didiskusikan bersama sebelum sesi tatap muka Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.	Pustaka: Klitgaard (1988); Rose-Ackerman & Palifka (2016); Transparency International (2023); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			minimal 3 provinsi KTI, analisis pola korelasi, identifikasi mekanisme transmisi korupsi, dan satu rekomendasi kebijakan antikorupsi berbasis data	Secara individu, mahasiswa menyusun memo analisis data empiris yang menghubungkan korupsi dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Memo memuat: (1) tabel komparasi data CPI 2023, IPM 2022/2023, dan tingkat kemiskinan untuk minimal 3 provinsi KTI yang bersumber dari Transparency International dan BPS; (2) analisis pola korelasi data dengan narasi berbasis bukti; (3) identifikasi minimal dua mekanisme transmisi dampak korupsi terhadap layanan publik atau kesejahteraan; (4) satu rekomendasi kebijakan antikorupsi yang relevan untuk konteks KTI, disertai argumentasi berbasis data. Memo ditulis dalam bahasa Indonesia akademik. Deklarasi penggunaan AI			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wajib dicantumkan bila alat tersebut digunakan. Deliverable: Memo analisis data empiris (2 halaman A4 isi, tidak termasuk tabel dan daftar sumber) diunggah ke LMS UNISAN dalam format PDF paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 4			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Evaluasi studi kasus komparatif: mahasiswa diberikan dua ringkasan kasus daerah KTI (satu dengan tata kelola baik, satu dengan rekam jejak korupsi signifikan) dan diminta menganalisis perbedaan capaian	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan presentasi singkat tentang kerangka analisis dampak korupsi multidimensi (ekonomi, sosial, politik) mengacu pada Rose-Ackerman dan Pope; dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok dan diskusi kelas yang berfokus pada implikasi kebijakan untuk KTI (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penyusunan laporan analisis komparatif dan rubrik penilaian ke LMS; dosen memberikan umpan balik tertulis atas memo analisis data yang dikumpulkan pada Minggu 3 sebagai dasar revisi laporan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses data sektoral	Bahan Kajian: • Dampak korupsi terhadap sektor layanan publik: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di KTI; • Analisis komparatif indikator kesejahteraan antar daerah di Kawasan Timur Indonesia; • Evaluasi upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah KTI;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kesejahteraan serta mengevaluasi faktor penentu perbedaan tersebut; dinilai berdasarkan kedalaman analisis komparatif dan penggunaan data pendukung Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi temuan kelompok: kejelasan visualisasi data, kemampuan menjawab pertanyaan berbasis bukti, dan kontribusi konstruktif dalam sesi tanya jawab antar kelompok sebagai wujud nilai Service (solusi	Tiap kelompok mempresentasikan analisis komparatif dua daerah KTI (10 menit presentasi + 5 menit tanya jawab) menggunakan visualisasi data; kelas memberikan umpan balik terstruktur menggunakan lembar peer-review yang disediakan dosen MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi peer-review: kelompok memaparkan temuan komparatif, menerima pertanyaan kritis dari kelompok lain, dan merespons dengan argumen berbasis data; dosen menyimpulkan pola lintas daerah dan menghubungkan dengan strategi pencegahan korupsi yang akan dibahas pada minggu-minggu berikutnya	(Kemendikbud, Kemenkes, BPS) dan laporan BPKP terkait pengawasan pemerintahan daerah KTI; mahasiswa mengintegrasikan umpan balik dosen dari memo Minggu 3 untuk memperkuat analisis dalam laporan komparatif MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara berkelompok mengembangkan kerangka analisis komparatif dua daerah KTI yang akan dipresentasikan pada sesi luring, dengan pembagian tugas anggota yang jelas dan terdokumentasi dalam log kerja kelompok	• Kerangka analisis dampak korupsi multidimensi: ekonomi, sosial, dan politik; Pustaka: Rose-Ackerman & Palifka (2016); Pope (2000); Transparency International (2023); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berorientasi publik) Tugas: Laporan analisis komparatif dampak korupsi: dokumen 3 halaman A4 yang membandingkan minimal dua daerah KTI secara sistematis mencakup data CPI, indikator kesejahteraan sektoral, studi kasus korupsi terdokumentasi, dan rekomendasi berbasis bukti; merupakan pengembangan dari memo Minggu 3	Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Secara berkelompok (4-5 orang), mahasiswa menyusun laporan analisis komparatif dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di dua daerah KTI yang dipilih kelompok. Laporan merupakan pengembangan dari memo individu Minggu 3 dan memuat: (1) profil singkat dua daerah KTI yang dibandingkan; (2) tabel komparasi data CPI, IPM, dan indikator sektoral (minimal pendidikan dan kesehatan) yang bersumber dari data resmi BPS, Kemendikbud, Kemenkes, atau Transparency International; (3) analisis minimal dua kasus korupsi terdokumentasi yang berdampak langsung pada sektor layanan publik di salah satu atau kedua daerah tersebut; (4)	Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				evaluasi upaya pencegahan korupsi yang telah diterapkan; dan (5) rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang kontekstual untuk KTI. Laporan disertai daftar sumber yang dapat diverifikasi dan deklarasi penggunaan AI bila relevan. Deliverable: Laporan analisis komparatif (3 halaman A4 isi, tidak termasuk tabel, grafik, dan daftar sumber) beserta file presentasi kelompok (minimal 8 slide), diunggah ke LMS UNISAN dalam format PDF paling lambat pada hari pelaksanaan sesi luring Minggu 4			
5,6	Sub-CPMK3: Mengidentifikasi celah sistem, aktor, dan modus operandi korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dengan mengacu pada skema fraud	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi minimal tiga celah sistemik dalam siklus pengadaan barang/jasa	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi kelompok berbasis studi kasus korupsi pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah singkat (15-20 menit) yang menjelaskan siklus pengadaan barang/jasa	Bahan Kajian: • Korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	triangle dan regulasi pengadaan (Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021).	pemerintah daerah berdasarkan Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 • Memetakan aktor-aktor yang berpotensi terlibat dalam korupsi pengadaan (pengguna anggaran, panitia pengadaan, penyedia jasa) beserta peran masing-masing • Menganalisis modus operandi korupsi pengadaan (mark-up harga, kolusi tender, pengaturan spesifikasi) menggunakan kerangka fraud triangle (tekanan, kesempatan, rasionalisasi) • Menghubungkan celah regulasi pengadaan dengan faktor-faktor penyebab korupsi menurut formula KLITGAARD ($C = M + D - A$)	penilaian formatif melalui akurasi identifikasi celah sistem dan kesesuaian analisis fraud triangle terhadap kasus pengadaan yang disajikan dosen Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok CBL diukur dari kemampuan mengajukan argumen berbasis regulasi, kesediaan mendengar perspektif berbeda (nilai Harmony), dan sikap kritis yang bertanggung jawab Tugas:	Kawasan Timur Indonesia (mis. kasus pengadaan alat kesehatan atau konstruksi jalan desa); dosen memaparkan peta modus operandi menggunakan diagram fraud triangle di papan tulis dan menaunkannya ke pasal-pasal Perpres (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok (4-5 orang) mendiskusikan kasus yang telah ditelaah secara daring, mengisi lembar kerja pemetaan aktor dan modus, lalu mempresentasikan temuan kelompok selama 5-7 menit per kelompok untuk mendapat umpan balik dosen MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis kelompok terhadap	pemerintah daerah, titik-titik rawan korupsi, dan kerangka fraud triangle; menyertakan tautan portal LKPP dan dokumen Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 di LMS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempelajari video kuliah dan membaca ringkasan regulasi pengadaan yang diunggah di LMS, kemudian mengisi kuis refleksi singkat (pilihan ganda 5 soal) tentang tahapan siklus pengadaan sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menelaah dokumen kasus pengadaan fiktif yang disediakan dosen di LMS	• Fraud triangle: tekanan, kesempatan, rasionalisasi dalam pengadaan publik; • Regulasi pengadaan: Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021; • Modus operandi: mark-up harga, kolusi tender, pengaturan spesifikasi teknis; • Pemetaan aktor dan celah sistemik dalam siklus pengadaan; Pustaka: Klitgaard (1988); Rose-Ackerman & Palifka (2016); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Lembar analisis fraud triangle: identifikasi satu kasus pengadaan fiktif atau mark-up di pemerintah daerah KTI, petakan tiga sudut fraud triangle, dan tunjukkan pasal Perpres yang dilanggar; panjang 300-500 kata disertai tabel pemetaan aktor, dikumpulkan via LMS	dokumen kasus pengadaan nyata/simulasi, diikuti pleno kelas untuk membandingkan temuan antar-kelompok dan merumuskan pola celah sistemik yang berulang Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu memilih satu kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di KTI yang pernah diliput media atau tercatat dalam putusan pengadilan/KPK, lalu menganalisisnya menggunakan kerangka fraud triangle. Analisis mencakup: identifikasi celah regulasi pengadaan yang dieksploitasi, pemetaan aktor dan peran, serta rekomendasi satu langkah pencegahan berbasis penguatan regulasi atau pengawasan. Jika menggunakan Generative AI untuk	dan mengidentifikasi indikasi penyimpangan sebelum sesi diskusi tatap muka Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				brainstorming, wajib menyertakan deklarasi penggunaan AI dan memastikan orisinalitas analisis sebagai wujud nilai Integrity. Deliverable: Lembar analisis tertulis 300-500 kata (format PDF) disertai tabel pemetaan aktor (kolom: nama/peran aktor, titik celah, sudut fraud triangle yang terpenuhi) dan satu paragraf rekomendasi pencegahan; dikumpulkan via LMS paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 6			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian formatif melalui ketepatan komparasi modus korupsi pengadaan vs. dana desa dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memimpin sesi analisis komparatif: menampilkan dua kasus berdampingan (kasus pengadaan pemerintah daerah vs. kasus korupsi dana desa KTI) menggunakan LCD proyektor, menjelaskan kesamaan dan perbedaan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan ringkas tentang mekanisme pengelolaan dana desa, titik rawan korupsi (perencanaan APBDes, pelaksanaan proyek fisik, pelaporan fiktif), dan tautan ke Laporan BPKP 2023 serta portal Sistem	Bahan Kajian: • Korupsi dana desa dan pelayanan publik di Kawasan Timur Indonesia; • Celah sistemik pengelolaan APBDes: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kedalaman analisis dampak terhadap pelayanan publik dalam diskusi dan laporan kelompok Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan diukur dari kontribusi argumen berbasis data laporan BPKP dan UU Desa, kemampuan menghubungkan konteks lokal KTI, serta sikap kolaboratif dalam tim (nilai Harmony dan Service) Tugas: Laporan kelompok komparatif: bandingkan dua kasus korupsi (satu kasus	pola fraud triangle, dan membahas kelemahan mekanisme pengawasan desa (BPD, inspektorat kabupaten) dalam konteks keterbatasan kapasitas SDM di KTI (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok (4-5 orang, melanjutkan kelompok Minggu 5) mendiskusikan temuan mandiri mereka, mengisi matriks komparasi fraud triangle dua kasus, dan merumuskan satu rekomendasi perbaikan pengawasan yang realistis sesuai kondisi infrastruktur dan SDM desa di KTI; tiap kelompok mempresentasikan matriks selama 5-7 menit MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis komparatif dua	Informasi Desa di LMS; menyertakan video pendek (10-15 menit) tentang studi kasus korupsi dana desa di wilayah KTI (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses dan membaca Laporan Hasil Pengawasan Nasional BPKP 2023 (bagian dana desa) serta UU No. 6 Tahun 2014 pasal-pasal terkait pengelolaan keuangan desa yang disediakan di LMS, kemudian mencatat minimal tiga temuan penyimpangan yang akan dibawa ke sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menelaah data pengawasan BPKP dan	- Kelemahan kelembagaan pengawasan desa: BPD dan inspektorat kabupaten; - Komparasi modus korupsi pengadaan daerah vs. korupsi dana desa; - Dampak korupsi dana desa terhadap kualitas layanan publik masyarakat desa KTI; Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Klitgaard (1988); Rose-Ackerman & Palifka (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengadaan pemerintah daerah dari Minggu 5 dan satu kasus korupsi dana desa di KTI), gunakan matriks fraud triangle, analisis dampak pelayanan publik, dan usulan perbaikan pengawasan; panjang 600-800 kata, dikumpulkan via LMS	kasus secara kelompok dengan panduan matriks terstruktur, diikuti pleno kelas untuk sintesis temuan dan implikasi kebijakan pengawasan dana desa di KTI Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Setiap kelompok menyusun laporan komparatif yang membandingkan satu kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah (dapat menggunakan kasus dari Minggu 5) dengan satu kasus korupsi dana desa yang terjadi di KTI. Laporan memuat: matriks fraud triangle kedua kasus secara berdampingan, analisis dampak terhadap kualitas pelayanan publik masyarakat desa, identifikasi celah pengawasan kelembagaan (BPD/inspektorat), dan	menyiapkan poin analisis komparatif antara kasus pengadaan (Minggu 5) dan kasus dana desa sebelum sesi diskusi kelompok Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				satu rekomendasi perbaikan yang mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan SDM desa di KTI. Orientasi rekomendasi mencerminkan nilai Service (berpihak pada kepentingan masyarakat desa) dan Adaptability (solusi yang realistis di KTI). Deliverable: Laporan kelompok tertulis 600-800 kata (format PDF) yang memuat matriks komparasi fraud triangle (tabel), paragraf analisis dampak pelayanan publik, dan paragraf rekomendasi pengawasan; dikumpulkan via LMS paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 7			
7	Sub-CPMK5: Menginternalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab antikorupsi dengan menampilkan perilaku	Mahasiswa mampu: • Merefleksikan secara kritis kaitan antara nilai-nilai Pancasila	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi diskusi reflektif berpasangan (think-pair-share): mahasiswa berbagi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan tentang nilai integritas dalam etika pemerintahan,	Bahan Kajian: • Nilai integritas, kejujuran, dan keberanian antikorupsi;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	akademik berintegritas (bebas plagiarisme, jujur dalam pelaporan data) serta merefleksikan komitmen personal terhadap etika pemerintahan berbasis Pancasila.	(sila ke-1, ke-3, ke-5) dan komitmen antikorupsi dalam konteks tata kelola pemerintahan • Menampilkan perilaku akademik berintegritas dalam penyusunan dan presentasi tugas analisis kasus: bebas plagiarisme, jujur dalam pengutipan data, dan transparan dalam deklarasi penggunaan AI • Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika pemerintahan (konflik kepentingan, gratifikasi, nepotisme) dan menghubungkannya dengan kasus-kasus nyata yang telah dianalisis pada Minggu 5-6	formatif melalui kualitas refleksi tertulis: kedalaman penghubungan nilai Pancasila dengan perilaku antikorupsi, kejelasan komitmen personal, dan konsistensi antara pernyataan nilai dengan perilaku akademik yang ditunjukkan selama Minggu 5-7 Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi reflektif diukur dari keberanian menyampaikan refleksi personal secara jujur (nilai Integrity dan Nationalism), kemampuan	catatan refleksi awal dengan rekan, kemudian dosen mengarahkan pleno kelas untuk merumuskan pola nilai integritas dan etika pemerintahan yang muncul dari berbagai refleksi; dosen memberikan penguatan konseptual tentang konflik kepentingan, gratifikasi, dan nepotisme serta kaitannya dengan regulasi (Peraturan KPK No. 2/2019) (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara berpasangan mendiskusikan catatan refleksi masing-masing, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan komitmen personal, lalu masing-masing merumuskan komitmen personal antikorupsi yang akan dituangkan dalam esai reflektif; dosen memberikan umpan balik	ringkasan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dan panduan penulisan esai reflektif di LMS; menyertakan video pendek (10-12 menit) berisi narasi tokoh pemerintahan berintegritas dari konteks Indonesia Timur sebagai pemantik refleksi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bahan tentang etika pemerintahan dan Peraturan KPK No. 2/2019 yang diunggah di LMS, menelaah Modul Integritas KPK (2021) bagian nilai-nilai antikorupsi, lalu membuat catatan refleksi awal (minimal 5 poin) tentang kaitan Pancasila dan antikorupsi sebelum sesi luring	• Etika pemerintahan: konflik kepentingan, gratifikasi, nepotisme; • Komitmen Pancasila sebagai landasan moral antikorupsi; • Perilaku akademik berintegritas: anti-plagiarisme dan transparansi data; • Regulasi gratifikasi: Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019; Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; United Nations Office on Drugs and Crime (2004).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Merumuskan satu komitmen personal antikorupsi yang spesifik, terukur, dan relevan dengan peran sebagai calon aparatur atau warga negara di lingkungan pemerintahan daerah KTI	merespons refleksi rekan secara empatik (nilai Harmony), dan ketidakhadiran indikasi plagiarisme atau manipulasi data dalam seluruh tugas yang dikumpulkan Tugas: Esai reflektif personal: uraian komitmen antikorupsi pribadi yang dikaitkan dengan minimal dua nilai Pancasila dan diperkuat dengan satu contoh konkret dari kasus yang dianalisis pada Minggu 5 atau 6; panjang 400-600 kata, dikumpulkan via LMS	kualitatif di akhir sesi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning (refleksi nilai): melalui aktivitas think-pair-share dan penulisan komitmen personal, mahasiswa membangun landasan nilai integritas yang akan menjadi fondasi etis perancangan inovasi antikorupsi pada Minggu 9-12 Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menulis esai reflektif yang menghubungkan minimal dua nilai Pancasila dengan komitmen personal antikorupsi dalam konteks peran mereka sebagai calon aparatur atau warga negara aktif di KTI. Esai harus mengacu pada	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis refleksi: mahasiswa mengaitkan kasus-kasus Minggu 5-6 dengan dimensi etika pemerintahan dan nilai Pancasila secara mandiri sebelum sesi diskusi Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				minimal satu kasus kongkret yang dianalisis pada Minggu 5 atau 6, menjelaskan bagaimana nilai Pancasila yang dipilih seharusnya memandu perilaku aktor dalam kasus tersebut, dan menutup dengan pernyataan komitmen personal yang spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Esai wajib bebas plagiarisme; jika menggunakan Generative AI untuk penyuntingan bahasa, wajib menyertakan deklarasi penggunaan AI. Nilai Integrity, Nationalism, dan Service menjadi penanda utama penilaian esai ini. Deliverable: Esai reflektif personal 400-600 kata (format PDF) yang memuat: identifikasi dua nilai Pancasila, kaitannya dengan kasus Minggu 5 atau 6, dan pernyataan komitmen personal antikorupsi yang spesifik;			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dilengkapi deklarasi integritas akademik (bebas plagiarisme dan deklarasi AI bila digunakan); dikumpulkan via LMS paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 8 (UTS)			
8		Mahasiswa mampu: • Menganalisis kasus korupsi yang disajikan menggunakan minimal dua kerangka analisis yang telah dipelajari (fraud triangle, formula Klitgaard, atau tipologi korupsi) secara sistematis dan berbasis bukti • Mengidentifikasi celah sistem, aktor, dan modus operandi korupsi dalam kasus UTS dengan merujuk pada regulasi yang relevan (Perpres No. 16/2018, UU No. 6/2014, atau kerangka	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Tengah Semester berbentuk analisis kasus tertulis (take-home atau in-class sesuai kebijakan dosen): mahasiswa menganalisis satu kasus korupsi yang disediakan dosen menggunakan kerangka yang telah dipelajari; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi celah	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membacakan tata tertib UTS, membagikan lembar soal (bila ujian in-class), mengawasi pelaksanaan ujian, dan memberikan penjelasan teknis bila ada pertanyaan prosedural sebelum ujian dimulai (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan UTS secara individual dan mandiri dalam ruang ujian; menuliskan analisis kasus berdasarkan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan analitis yang	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mendistribusikan soal UTS dan panduan pengerjaan melalui LMS; memberikan penjelasan teknis tata tertib UTS (termasuk larangan plagiasi dan ketentuan penggunaan referensi) melalui pengumuman LMS sebelum pelaksanaan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh soal UTS dari LMS, mengerjakan analisis kasus secara mandiri dengan memanfaatkan catatan dan materi	Bahan Kajian: • Analisis kasus korupsi berbasis bukti: integrasi materi Minggu 1-7; • Penerapan fraud triangle dan formula Klitgaard pada kasus nyata; • Celah sistem dan regulasi: pengadaan barang/jasa dan dana desa; • Dampak korupsi terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; • Integritas akademik sebagai wujud nilai	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		hukum antikorupsi Indonesia) • Menghubungkan temuan analisis kasus dengan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik • Menampilkan integritas akademik: jawaban orisinal, bebas plagiarisme, dan berbasis substansi perkuliahan Minggu 1-7	dan aktor, kedalaman analisis kerangka teoritis, kesesuaian rujukan regulasi, dan koherensi argumen; panjang jawaban 500-700 kata Partisipasi kelas & laboratorium: Tidak ada komponen partisipasi pada minggu UTS; penilaian sepenuhnya pada kualitas jawaban analisis kasus dan integritas akademik (bebas plagiarisme, orisinalitas argumen) Tugas: Jawaban UTS berupa analisis	dibangun selama Minggu 1-7; menyerahkan jawaban kepada dosen atau mengunggah ke LMS sesuai mekanisme yang ditetapkan MP — Metode Pembelajaran: Evaluasi sumatif in-class: ujian analisis kasus individual yang mengintegrasikan capaian Sub-CPMK 1 hingga Sub-CPMK 5 sebagaimana dipelajari pada Minggu 1-7 Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Ujian Tengah Semester merupakan evaluasi sumatif individual yang mengukur kemampuan mahasiswa mengintegrasikan seluruh materi Minggu 1-7. Mahasiswa menganalisis satu kasus korupsi yang disediakan dosen	perkuliahan Minggu 1-7, dan mengunggah jawaban melalui fitur pengumpulan tugas LMS sesuai batas waktu yang ditetapkan MP — Metode Pembelajaran: Evaluasi formatif-sumatif berbasis analisis kasus: mahasiswa menerapkan secara integratif seluruh kerangka konseptual dan analitis yang telah dibangun selama Minggu 1-7 Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.	antikorupsi; Pustaka: Klitgaard (1988); Rose-Ackerman & Palifka (2016); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); United Nations Office on Drugs and Crime (2004).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kasus tertulis 500-700 kata yang memuat: identifikasi celah/aktor/modus, penerapan minimal dua kerangka analisis, rujukan regulasi yang tepat, analisis dampak tata kelola, dan simpulan; dikumpulkan sesuai jadwal UTS yang ditetapkan	menggunakan minimal dua kerangka analisis (fraud triangle, formula Klitgaard $C = M + D - A$, atau tipologi korupsi), mengidentifikasi regulasi yang relevan, menganalisis dampak terhadap tata kelola dan pelayanan publik, serta menarik simpulan berbasis bukti. Integritas akademik (bebas plagiarisme, orisinalitas analisis) dinilai sebagai bagian tak terpisahkan dari penilaian UTS, mencerminkan nilai Integrity sebagai penciri ICHSA-N. Deliverable: Jawaban analisis kasus UTS tertulis 500-700 kata (format tulisan atau digital) yang memuat identifikasi celah/aktor/modus, penerapan dua kerangka analisis, rujukan regulasi, analisis dampak, dan simpulan; diserahkan sesuai jadwal dan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				mekanisme UTS yang ditetapkan program studi			
9,10	Sub-CPMK4: Mengevaluasi kasus korupsi dana desa dan pelayanan publik di daerah terpencil Kawasan Timur Indonesia dengan mengidentifikasi faktor pendorong struktural, kultural, dan individual serta merekomendasikan titik-titik intervensi pencegahan.	Mahasiswa mampu: - Mengidentifikasi minimal tiga faktor struktural (mis. lemahnya pengawasan APBDes, keterbatasan SDM pendamping desa) yang mendorong korupsi dana desa di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan laporan BPKP 2023 - Mengidentifikasi faktor kultural dan individual (mis. relasi patronase, rendahnya literasi antikorupsi kepala desa) yang memperparah risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa di daerah terpencil KTI - Menguraikan pola penyimpangan anggaran desa yang	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian berbasis analisis kasus tertulis yang mengukur kemampuan evaluasi (C5) atas faktor struktural, kultural, dan individual korupsi dana desa KTI beserta identifikasi titik intervensi yang konkret dan kontekstual Partisipasi kelas & laboratorium: Aktif mengajukan argumen berbasis data laporan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi panel kelas berbasis kasus nyata korupsi dana desa KTI; dosen memandu aplikasi formula $C = M + D - A$ untuk mendekonstruksi faktor penyebab, kemudian memandu penyusunan matriks intervensi per kelompok di papan tulis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil (3-4 orang) untuk mendiskusikan hasil pra-analisis daring, menyepakati faktor dominan, dan merancang tabel titik intervensi pencegahan yang spesifik untuk konteks desa terpencil KTI	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video ceramah singkat (15-20 menit) di LMS UNISAN yang memaparkan pola korupsi dana desa di KTI berdasarkan Laporan BPKP 2023 dan regulasi UU Desa No. 6 Tahun 2014, disertai panduan akses portal Sistem Informasi Desa dan LHKPN KPK untuk eksplorasi data (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh bahan bacaan wajib dari LMS, mengakses portal data desa relevan (Sistem Informasi Desa, JDIH Online), dan mengisi lembar pra-analisis kasus daring sebelum sesi	Bahan Kajian: - Korupsi dana desa dan pelayanan publik di Kawasan Timur Indonesia; - Faktor struktural, kultural, dan individual pendorong korupsi di daerah terpencil; - Formula monopoli, diskresi, dan akuntabilitas ($C = M + D - A$) dalam konteks pemerintahan desa; - Pola penyimpangan pengelolaan APBDes berdasarkan laporan pengawasan nasional; - Titik-titik intervensi pencegahan korupsi berbasis konteks lokal KTI;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terdokumentasi dalam laporan pengawasan nasional dengan memetakan rantai pertanggungjawaban yang terputus • Mengevaluasi kelemahan mekanisme pelayanan publik di daerah terpencil KTI yang menciptakan celah korupsi, mengacu pada kerangka formula $C = M + D - A$ dari Klitgaard • Merumuskan dua hingga tiga titik intervensi pencegahan yang kontekstual bagi kondisi infrastruktur dan kapasitas kelembagaan desa di KTI	BPKP/KPK dalam diskusi kelompok, menghargai perspektif konteks lokal anggota tim yang berbeda latar daerah (nilai Harmony dan Integrity), serta mendeklarasikan penggunaan AI bila digunakan dalam eksplorasi kasus Tugas: Laporan analisis kasus awal: peta faktor pendorong korupsi dana desa di satu kabupaten/desa di KTI (nyata atau simulasi berbasis data sekunder), format 600-800 kata, dilampiri matriks faktor dan titik intervensi	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mempresentasikan temuan analisis kasus secara bergantian (5 menit per kelompok), diikuti sesi tanya-jawab kritis antarkelas untuk mengasah kemampuan evaluasi berbasis bukti Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Mahasiswa (individual) menyusun laporan analisis kasus korupsi dana desa di satu wilayah KTI yang dipilih berdasarkan data laporan BPKP 2023 atau berita terverifikasi. Laporan mencakup: (1) deskripsi singkat kasus, (2) identifikasi faktor struktural, kultural, dan individual menggunakan kerangka Klitgaard, (3) peta rantai	luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menelaah minimal satu studi kasus korupsi dana desa KTI dari laporan BPKP atau berita terverifikasi, lalu mengisi template analisis faktor di LMS sebagai bahan diskusi sesi luring Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.	Pustaka: Klitgaard (1988); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Rose-Ackerman & Palifka (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(dikumpulkan akhir minggu 9)	pertanggungjawaban yang terputus, dan (4) minimal dua rekomendasi titik intervensi pencegahan yang kontekstual bagi kapasitas kelembagaan dan infrastruktur desa di KTI. Mahasiswa wajib menyertakan deklarasi penggunaan AI bila menggunakan Generative AI dalam proses penyusunan (nilai Integrity). Deliverable: Laporan analisis kasus tertulis 600-800 kata (format PDF/Word) disertai satu matriks faktor dan titik intervensi (tabel), diunggah ke LMS UNISAN paling lambat akhir pekan minggu 9			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian berbasis laporan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok dan peer-review terstruktur; setiap kelompok mempresentasikan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan templat laporan analisis berbasis bukti dan rubrik penilaian di LMS UNISAN, mengunggah	Bahan Kajian: • Analisis kasus korupsi berbasis bukti: sintesis faktor dan perbandingan mekanisme pengawasan;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			analisis berbasis bukti yang mengukur kemampuan sintesis dan evaluasi (C5-C6) atas kasus korupsi dana desa KTI, dinilai menggunakan rubrik yang mencakup kedalaman argumen, validitas sumber, kelayakan rekomendasi, dan struktur penulisan Partisipasi kelas & laboratorium: Memberikan umpan balik konstruktif terhadap rekomendasi kelompok lain dalam forum peer-review di LMS atau diskusi luring,	evaluasi kasus dan rekomendasi (maksimal 10 menit), diikuti tanya-jawab kritis 5 menit dari kelompok penyanggah yang ditunjuk; dosen memberikan umpan balik formatif berbasis rubrik (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak presentasi kelompok lain secara kritis, mengisi lembar peer-review yang mencatat kekuatan argumen, validitas bukti, dan kelayakan rekomendasi, kemudian menggunakannya untuk revisi laporan final MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan peer-review: kelompok saling mengevaluasi kualitas analisis dan rekomendasi berbasis bukti, mendorong	contoh laporan evaluasi kasus korupsi desa yang baik sebagai model, serta membuka forum diskusi daring untuk konsultasi kelompok sebelum sesi presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Kelompok mahasiswa melengkapi laporan analisis dengan menambahkan perbandingan mekanisme pengawasan dan rekomendasi intervensi terstruktur, mengakses portal LHKPN KPK, laporan BPKP, dan JDIH Online sebagai sumber data tambahan yang dapat diverifikasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mengintegrasikan temuan analisis kasus	• Mekanisme pengawasan dana desa: BPD, pendampingan BPKP, dan sistem pelaporan daring; • Kerangka rekomendasi intervensi pencegahan: regulasi, kapasitas SDM, dan teknologi di KTI; • Prinsip akuntabilitas publik UNCAC dalam konteks pemerintahan desa; • Standar pelaporan analisis berbasis bukti dalam kajian antikorupsi; Pustaka: Klitgaard (1988); Rose-Ackerman & Palifka (2016); United Nations Office on Drugs and Crime (2004); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Undang-Undang	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menunjukkan tanggung jawab kolektif atas kualitas analisis tim (nilai Harmony dan Service), serta menjaga integritas akademik dalam penggunaan data Tugas: Laporan analisis berbasis bukti (laporan kelompok): evaluasi mendalam atas satu kasus korupsi dana desa KTI beserta matriks rekomendasi intervensi, 1.000-1.200 kata, diunggah ke LMS beserta slide ringkasan 5-7 halaman untuk presentasi (dikumpulkan	kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab akademik bersama Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun laporan analisis berbasis bukti atas satu kasus korupsi dana desa atau pelayanan publik di KTI yang ditetapkan atau dipilih bersama dosen. Laporan mencakup: (1) sintesis faktor penyebab dari berbagai dimensi (struktural, kultural, individual), (2) perbandingan efektivitas minimal dua mekanisme pengawasan yang ada, (3) matriks rekomendasi intervensi pencegahan yang merinci dimensi regulasi, kapasitas SDM, dan teknologi, serta (4) kaitan rekomendasi dengan prinsip UNCAC dan konteks keterbatasan KTI.	minggu 9 menjadi laporan evaluasi komprehensif dengan komponen rekomendasi intervensi yang siap dipresentasikan, sesuai tahapan perencanaan-analisis-rekomendasi Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.	Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sebelum sesi luring minggu 10)	Setiap anggota kelompok menandatangani pernyataan kontribusi dan deklarasi integritas akademik. Deliverable: Laporan kelompok tertulis 1.000-1.200 kata (PDF/Word) beserta slide presentasi 5-7 halaman (PPT/PDF), diunggah ke LMS UNISAN sebelum sesi luring minggu 10; lembar peer-review individual dikumpulkan usai sesi presentasi			
11,12	Sub-CPMK6: Menampilkan keberanian antikorupsi dan tanggung jawab sosial melalui perancangan dan pelaksanaan kampanye edukasi antikorupsi skala kecil (poster, konten media sosial, atau sosialisasi singkat) yang ditujukan kepada komunitas kampus atau masyarakat sekitar.	Mahasiswa mampu: Merumuskan pesan kunci kampanye edukasi antikorupsi yang relevan bagi audiens kampus atau masyarakat sekitar, berdasarkan nilai integritas, kejujuran, dan keberanian antikorupsi (nilai Integrity dan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian berbasis rancangan produk kampanye yang mengukur kemampuan perancangan (P3/A3) atas materi edukasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi workshop perancangan kampanye: (1) presentasi singkat dosen tentang prinsip pesan antikorupsi yang efektif dan etis, (2) kerja tim di kelas untuk menyempurnakan rancangan produk kampanye berdasarkan umpan balik teman sebaya, (3) tur mini galeri: tiap tim	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan perancangan kampanye edukasi antikorupsi di LMS UNISAN, menyertakan contoh kampanye antikorupsi yang efektif dari KPK (mis. kampanye Hakordia atau ACLC KPK) sebagai model, dan membuka konsultasi daring untuk	Bahan Kajian: - Nilai integritas, kejujuran, dan keberanian antikorupsi sebagai landasan kampanye edukasi; - Prinsip perancangan kampanye edukasi antikorupsi: pesan, audiens, dan kanal;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Nationalism) • Merancang minimal satu produk kampanye (poster, konten media sosial, atau materi sosialisasi singkat) dengan pesan yang jelas, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik (nilai Service dan Creativity) • Mengidentifikasi audiens sasaran, kanal distribusi, dan strategi pesan kampanye yang sesuai dengan konteks komunitas kampus atau masyarakat lokal sekitar UNISAN • Menunjukkan tanggung jawab sosial dalam perancangan konten kampanye dengan memastikan ketepatan informasi antikorupsi dan tidak menyesatkan publik	antikorupsi, dinilai menggunakan rubrik yang mencakup kejelasan pesan, kesesuaian audiens, akurasi konten, dan kreativitas desain Partisipasi kelas & laboratorium: Berkontribusi aktif dalam tim perancangan kampanye, menghargai masukan rekan terkait kesesuaian pesan dengan konteks lokal (nilai Harmony), dan menunjukkan keberanian menyuarakan nilai antikorupsi melalui konten yang dirancang (nilai Integrity)	memajang draf kampanye dan menerima umpan balik lisan dari kelas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam tim (3-4 orang) menyempurnakan rancangan poster atau konten media sosial atau naskah sosialisasi, mempertimbangkan umpan balik galeri mini untuk revisi akhir, dan mendokumentasikan alasan perancangan dalam lembar konsep MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan teknik galeri (gallery walk): mendorong kolaborasi kreatif antartim, saling mengevaluasi kesesuaian pesan antikorupsi dengan konteks lokal, dan membangun keberanian	tim terkait konsep kampanye yang dirancang (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah contoh kampanye antikorupsi dari kanal resmi KPK dan Transparency International, mendiskusikan konsep kampanye tim melalui forum LMS, dan mulai menyusun draf pesan kunci serta rancangan awal produk kampanye menggunakan perangkat desain yang tersedia (Figma, Canva, atau sejenis) MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tim mahasiswa memulai siklus perancangan kampanye dari analisis audiens hingga draf	• Etika pemerintahan dan komitmen Pancasila sebagai sumber nilai kampanye; • Contoh kampanye antikorupsi KPK dan praktik terbaik komunikasi publik antikorupsi; • Tanggung jawab sosial dalam komunikasi antikorupsi kepada masyarakat; Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); Transparency International (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(nilai Integrity) • Menjelaskan alasan pemilihan format dan kanal kampanye berdasarkan analisis kebutuhan audiens sasaran	Tugas: Rancangan produk kampanye: satu poster atau dua konten media sosial atau naskah sosialisasi singkat (5-7 menit) lengkap dengan rasional pesan, profil audiens, dan rencana distribusi/pelaksanaan, disertai lembar rancangan konsep 300-400 kata (dikumpulkan akhir minggu 11)	menyuarakan nilai integritas secara publik Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Tim (3-4 mahasiswa) merancang satu produk kampanye edukasi antikorupsi yang ditujukan kepada komunitas kampus UNISAN atau masyarakat sekitar. Produk dapat berupa: poster (A3, cetak atau digital), dua konten media sosial (Instagram/TikTok dengan caption), atau naskah sosialisasi singkat 5-7 menit siap disajikan. Rancangan harus mencakup: (1) profil audiens sasaran, (2) pesan kunci antikorupsi yang berpijak pada nilai integritas dan Pancasila, (3) rasional pemilihan format dan kanal distribusi, dan (4) rencana distribusi atau jadwal pelaksanaan sosialisasi	produk, dengan umpan balik asinkron dari dosen melalui LMS sebelum finalisasi di sesi luring Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pada minggu 12. Tim wajib memastikan seluruh informasi factual akurat dan dapat diverifikasi (nilai Integrity dan Service). Deliverable: Draf produk kampanye (file desain poster/konten media sosial dalam format PDF atau JPG, atau naskah sosialisasi dalam format Word/PDF) beserta lembar rancangan konsep 300-400 kata, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat akhir pekan minggu 11			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian berbasis laporan pelaksanaan dan refleksi kampanye yang mengukur kemampuan pelaksanaan (P3) dan evaluasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi akhir kampanye: setiap tim mempresentasikan pelaksanaan kampanye, menayangkan produk yang telah didistribusikan atau disimulasikan, dan memaparkan evaluasi serta refleksi (maksimal 10 menit per tim); dosen	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka kanal pengunggahan dokumentasi kampanye di LMS UNISAN, menyediakan templat laporan pelaksanaan dan refleksi, serta memberikan umpan balik tertulis atas dokumentasi yang diunggah tim dalam tenggat yang ditetapkan	Bahan Kajian: • Pelaksanaan kampanye edukasi antikorupsi: strategi distribusi pesan dan keterlibatan audiens; • Evaluasi kampanye edukasi: indikator ketercapaian dan analisis respons audiens;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			reflektif (C5/A3), dinilai menggunakan rubrik yang mencakup bukti pelaksanaan, kualitas dokumentasi, kedalaman refleksi, dan keberanian menyampaikan pesan antikorupsi Partisipasi kelas & laboratorium: Menunjukkan tanggung jawab penuh sebagai anggota tim dalam pelaksanaan kampanye, aktif merespons pertanyaan audiens selama sosialisasi atau diskusi kelas dengan argumen berbasis nilai antikorupsi, serta	memimpin diskusi kelas mengenai kaitan pengalaman kampanye dengan tantangan antikorupsi nyata di lingkungan KTI (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak dan mengevaluasi presentasi tim lain secara kritis menggunakan lembar observasi sederhana yang disediakan dosen, kemudian berpartisipasi dalam diskusi reflektif tentang nilai keberanian antikorupsi dan tanggung jawab sosial sebagai calon aparaturnya atau warga negara (nilai Nationalism) MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi reflektif: mengakhiri siklus proyek kampanye dengan akuntabilitas publik di	(via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Tim mahasiswa mengunggah bukti distribusi kampanye (mis. tangkapan layar penayangan konten media sosial, foto distribusi poster, atau rekaman/foto sosialisasi) ke LMS, mengisi templat evaluasi ketercapaian tujuan kampanye, dan menyusun draf refleksi kritis secara kolaboratif MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tim menyelesaikan siklus penuh proyek kampanye dari perancangan (minggu 11) ke pelaksanaan dan evaluasi, dengan dokumentasi sebagai bukti otentik capaian	• Refleksi kritis: internalisasi nilai integritas, keberanian, dan tanggung jawab sosial antikorupsi; • Peran warga negara dan calon aparaturnya dalam pencegahan korupsi berbasis komunitas; • Nilai Pancasila dan semangat kebangsaan sebagai landasan moral antikorupsi; Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); Transparency International (2023); United Nations Office on Drugs and Crime (2004).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memberikan umpan balik reflektif terhadap kampanye tim lain (nilai Harmony, Service, dan Integrity) Tugas: Laporan pelaksanaan kampanye: dokumentasi proses (foto/tangkapan layar/laporan singkat), evaluasi ketercapaian tujuan, dan refleksi kritis tim, 500-700 kata, dilampiri bukti distribusi atau dokumentasi pelaksanaan (dikumpulkan satu minggu setelah sesi luring minggu 12)	depan sesama mahasiswa dan dosen, mendorong internalisasi nilai integritas dan keberanian antikorupsi melalui pengalaman langsung Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Tim (3-4 mahasiswa) melaksanakan kampanye edukasi antikorupsi yang telah dirancang pada minggu 11, baik secara nyata kepada komunitas kampus UNISAN atau masyarakat sekitar, maupun disimulasikan di depan kelas bila distribusi eksternal tidak memungkinkan. Setelah pelaksanaan, tim menyusun laporan yang mencakup: (1) dokumentasi pelaksanaan (foto, tangkapan layar, atau catatan lapangan), (2) evaluasi ketercapaian tujuan berdasarkan indikator sederhana yang	kompetensi Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				telah ditetapkan, (3) refleksi kritis tentang efektivitas pesan dan respons audiens, serta (4) pelajaran yang dipetik dan relevansinya bagi upaya pencegahan korupsi di konteks lokal KTI. Setiap anggota tim menulis paragraf refleksi individual (150-200 kata) yang menggambarkan internalisasi nilai antikorupsi melalui pengalaman kampanye ini (nilai Integrity dan Nationalism). Deliverable: Laporan pelaksanaan kampanye tim 500-700 kata (PDF/Word) disertai bukti dokumentasi (foto/tangkapan layar/rekaman dalam format ZIP atau Google Drive link) dan paragraf refleksi individual tiap anggota; seluruh berkas diunggah ke LMS UNISAN dalam satu minggu setelah sesi luring minggu 12			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13,14	Sub-CPMK7: Merancang konsep inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi (sistem pelaporan pengaduan daring, dashboard transparansi anggaran desa, atau aplikasi pemantauan pelayanan publik) yang adaptif terhadap infrastruktur digital Kawasan Timur Indonesia, dituangkan dalam proposal inovasi terstruktur.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi minimal dua celah sistemik korupsi di pemerintahan daerah atau desa di Kawasan Timur Indonesia yang menjadi landasan perancangan inovasi • Merumuskan konsep inovasi teknologi antikorupsi (sistem pelaporan pengaduan daring, dashboard transparansi anggaran desa, atau aplikasi pemantauan pelayanan publik) secara terstruktur mencakup latar belakang masalah, tujuan, dan sasaran pengguna • Merancang arsitektur fitur minimal dan alur kerja prototipe inovasi yang adaptif terhadap keterbatasan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas proses perancangan yang tertuang dalam draft proposal inovasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi workshop perancangan: kelengkapan pengisian kanvas inovasi, kontribusi argumentatif dalam diskusi kelompok, dan ketaatan pada etika akademik termasuk	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi workshop perancangan inovasi: (1) paparan singkat kriteria proposal inovasi antikorupsi adaptif KTI (15 menit), (2) klinik kelompok: dosen berkeliling memberi umpan balik langsung atas draft kanvas dan wireframe tiap kelompok (60 menit), (3) sesi pleno singkat: tiap kelompok mempresentasikan konsep awal inovasinya dalam 3 menit untuk mendapat tanggapan kelas (25 menit) (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok di meja kerja kelompok: menyempurnakan analisis masalah berdasarkan kasus korupsi dana desa atau pengadaan barang/jasa di KTI yang dikaji pada	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rekaman video penjelasan kerangka proposal inovasi teknologi antikorupsi (template kanvas inovasi, kriteria adaptabilitas KTI, dan contoh wireframe dashboard transparansi anggaran desa) ke LMS; membuka forum diskusi daring untuk konsultasi pilihan topik inovasi per kelompok (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh template kanvas inovasi dan panduan penyusunan proposal dari LMS; mengeksplorasi portal LHKPN KPK, Sistem Informasi Desa, dan JDIH Online sebagai sumber data untuk analisis masalah;	Bahan Kajian: • Teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas publik; • Perancangan prototipe inovasi pencegahan korupsi; • Korupsi dana desa dan pelayanan publik di KTI (sebagai konteks masalah rancangan); Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		infrastruktur digital KTI • Mengintegrasikan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas publik ke dalam spesifikasi rancangan inovasi secara eksplisit • Menyusun draft proposal inovasi terstruktur mencakup analisis masalah, konsep solusi, rancangan prototipe/wireframe, dan rencana implementasi adaptif KTI	deklarasi penggunaan AI bila digunakan dalam proses brainstorming Tugas: Draft proposal inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi: minimum 8 halaman A4, mencakup (1) analisis masalah berbasis data/kasus nyata di KTI, (2) konsep dan nama inovasi, (3) arsitektur fitur minimal, (4) wireframe/sketsa antarmuka minimal 3 layar, (5) analisis adaptabilitas terhadap infrastruktur digital KTI, dan	minggu-minggu sebelumnya; merancang alur kerja dan wireframe prototipe; mengisi seluruh bagian kanvas inovasi; mendiskusikan strategi adaptabilitas infrastruktur digital MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan pendekatan design-thinking workshop: kelompok bergerak melalui tahapan empathize (identifikasi pengguna dan konteks KTI), define (rumusan masalah terukur), dan ideate-prototype (konsep fitur dan wireframe awal) dalam satu sesi terintegrasi Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Setiap kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun draft proposal inovasi	menggunakan Figma atau Google Sites untuk membuat wireframe awal; menyatakan deklarasi penggunaan AI jika brainstorming dibantu Generative AI MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tiap kelompok mengisi kanvas inovasi daring secara kolaboratif dan mengunggah draft kanvas ke forum LMS untuk mendapat umpan balik awal dosen sebelum sesi luring Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(6) daftar pustaka; dikumpulkan via LMS akhir minggu ke-13	pengegalan korupsi berbasis teknologi yang kontekstual bagi pemerintahan daerah atau desa di Kawasan Timur Indonesia. Proposal wajib mengidentifikasi celah sistemik korupsi berbasis data atau kasus nyata, merumuskan konsep inovasi teknologi yang adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur digital KTI, dan menyertakan wireframe/sketsa antarmuka minimal 3 layar. Nilai Creativity (perancangan solusi inovatif), Adaptability (kontekstualisasi terhadap KTI), dan Service (orientasi kepentingan publik) diwujudkan secara eksplisit dalam rancangan. Kelompok yang menggunakan Generative AI wajib melampirkan deklarasi penggunaan AI dan menjelaskan cara memastikan orisinalitas analisis sebagai wujud			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nilai Integrity. Deliverable: Draft proposal inovasi terstruktur dalam format PDF, minimum 8 halaman, mencakup: analisis masalah berbasis data/kasus KTI, konsep dan nama inovasi, arsitektur fitur minimal, wireframe/sketsa antarmuka minimal 3 layar, analisis adaptabilitas infrastruktur digital KTI, dan daftar pustaka; diunggah ke LMS paling lambat hari terakhir minggu ke-13			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian difokuskan pada kualitas proposal inovasi final sebagai luaran utama CPMK-4	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi peer-review terstruktur: (1) penjelasan prosedur dan etika peer-review (10 menit), (2) sesi lintas-baca: tiap kelompok membaca dan memberi umpan balik tertulis pada proposal kelompok pasangannya menggunakan formulir	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian proposal inovasi final dan rubrik presentasi UAS ke LMS; memberikan umpan balik tertulis individual atas draft proposal minggu ke-13 melalui fitur anotasi LMS; membuka sesi konsultasi daring	Bahan Kajian: • Perancangan prototipe inovasi pencegahan korupsi; • Teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas publik; • Kerangka hukum dan regulasi antikorupsi	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam sesi peer-review: kelengkapan dan kedalaman umpan balik tertulis yang diberikan kepada kelompok lain, serta keterbukaan dan responsivitas dalam menerima dan merespons masukan sebagai wujud nilai Harmony Tugas: Proposal inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi versi final: minimum 15 halaman A4, mencakup seluruh komponen terstruktur (analisis masalah, konsep inovasi,	review terstandar (40 menit), (3) sesi dialog: kelompok reviewer menyampaikan tiga catatan utama secara lisan kepada kelompok yang di-review (30 menit), (4) bimbingan individual: dosen mendampingi tiap kelompok untuk menyepakati prioritas revisi akhir (20 menit) (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa draft proposal lengkap beserta wireframe; mengisi formulir peer-review terstandar secara sistematis; mendiskusikan dan menyepakati pembagian tugas revisi dalam kelompok; merencanakan struktur dan alokasi waktu presentasi UAS minggu ke-15 MP — Metode Pembelajaran:	terjadwal (office hours virtual) untuk kelompok yang memerlukan bimbingan finalisasi (via LMS; sinkron/asinkron). MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan siklus revisi berbasis umpan balik: mahasiswa menerapkan siklus revise-refine secara mandiri dan kolaboratif, menggunakan portal data publik (LHKPN KPK, Sistem Informasi Desa, JDIH Online) untuk memperkuat landasan analisis masalah Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.	Indonesia (sebagai landasan normatif rancangan); Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); Rose-Ackerman dan Palifka (2016); United Nations Office on Drugs and Crime (2004); Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			arsitektur fitur, wireframe minimal 5 layar, rencana implementasi adaptif KTI, analisis risiko, landasan regulasi, dan daftar pustaka); dikumpulkan via LMS akhir minggu ke-14 sebagai dokumen presentasi UAS minggu ke-15	Project-Based Learning dengan teknik structured peer-review: kelompok mengembangkan kemampuan evaluasi kritis dan argumentasi berbasis bukti melalui pemberian dan penerimaan umpan balik konstruktif, menginternalisasi nilai Harmony dalam kolaborasi lintas perspektif Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Setiap kelompok menyelesaikan proposal inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi versi final dengan mengintegrasikan seluruh umpan balik dari dosen dan peer-review. Proposal wajib memuat landasan regulasi antikorupsi Indonesia yang relevan, analisis risiko implementasi di konteks infrastruktur digital KTI, dan strategi keberlanjutan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inovasi. Nilai Creativity tercermin pada orisinalitas solusi teknologi yang dirancang; Adaptability pada strategi implementasi yang realistis untuk KTI; Service pada orientasi solusi yang berpihak pada kepentingan publik; Nationalism pada penghayatan nilai Pancasila sebagai landasan moral perancangan. Kelompok juga menyiapkan bahan presentasi (slide) untuk UAS minggu ke-15. Deliverable: Dua dokumen diunggah ke LMS akhir minggu ke-14: (1) Proposal inovasi final dalam format PDF, minimum 15 halaman, dengan seluruh komponen lengkap; dan (2) Formulir peer-review terisi untuk kelompok yang dikaji, dalam format PDF			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Sub-CPMK8: Mempresentasikan dan mempertahankan proposal inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi secara komprehensif di hadapan audiens, mendemonstrasikan kemampuan argumentasi kritis, responsif terhadap pertanyaan, dan kreativitas solusi yang beretika.	Mahasiswa mampu: • Mempresentasikan proposal inovasi pencegahan korupsi berbasis teknologi secara sistematis dan komprehensif dalam batas waktu yang ditetapkan • Mempertahankan argumen rancangan inovasi dengan menghadirkan bukti dan logika yang koheren saat merespons pertanyaan audiens dan dosen • Mendemonstrasikan kreativitas solusi teknologi antikorupsi yang kontekstual bagi pemerintahan daerah dan desa di KTI melalui penyajian prototipe/wireframe	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian lisan dalam format sesi tanya jawab pasca-presentasi: dosen dan mahasiswa mengajukan pertanyaan substantif terkait rancangan inovasi; dinilai berdasarkan kedalaman pemahaman konseptual, kekuatan argumentasi, dan kemampuan mengaitkan rancangan dengan kerangka antikorupsi yang relevan; tidak ada butir soal tertulis yang dikerjakan saat itu	BP — Mekanisme kuliah: Dosen bertindak sebagai moderator dan penilai sesi presentasi UAS: (1) pembukaan dan penjelasan prosedur presentasi (10 menit), (2) sesi presentasi bergilir: tiap kelompok mendapat waktu 12 menit presentasi dan 8 menit tanya jawab (total disesuaikan jumlah kelompok), (3) dosen memberikan umpan balik lisan konsolidatif setelah semua kelompok selesai (15 menit), (4) penutupan refleksi akhir semester bersama: mahasiswa merefleksikan perjalanan belajar dari analisis kasus korupsi hingga perancangan inovasi sebagai wujud internalisasi nilai Nationalism dan komitmen antikorupsi (10 menit) (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah jadwal urutan presentasi, formulir penilaian presentasi, dan panduan pemberian umpan balik antar-kelompok ke LMS sebelum hari pelaksanaan; setelah sesi, mengunggah catatan umpan balik konsolidatif untuk seluruh kelompok sebagai refleksi akhir semester (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh jadwal dan formulir penilaian presentasi dari LMS; melakukan latihan presentasi mandiri atau dalam kelompok; memastikan file presentasi dan tautan prototipe/wireframe dapat diakses melalui perangkat yang tersedia	Bahan Kajian: • Perancangan prototipe inovasi pencegahan korupsi; • Teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas publik; • Nilai integritas, kejujuran, dan keberanian antikorupsi; • Etika pemerintahan dan komitmen Pancasila; Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); Rose-Ackerman dan Palifka (2016); Transparency International (2023).	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Menunjukkan sikap etis, percaya diri, dan terbuka terhadap kritik dalam forum presentasi sebagai cerminan nilai Integrity dan Harmony • Memberikan umpan balik kritis yang konstruktif dan berbasis argumen kepada minimal satu kelompok penyaji lain	Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas umpan balik yang diberikan kepada kelompok penyaji lain: ketajaman pertanyaan/komentar, kesantunan akademik, dan keberanian mengungkapkan pendapat kritis sebagai wujud nilai Integrity dan Service Tugas: Tidak ada tugas baru; penilaian didasarkan pada kualitas presentasi lisan, prototipe/wireframe yang ditampilkan, dan respons terhadap pertanyaan; nilai presentasi merupakan	Mekanisme & materi: Mahasiswa menyajikan proposal inovasi menggunakan slide presentasi dan menampilkan prototipe/wireframe secara langsung melalui LCD proyektor; mengajukan pertanyaan atau komentar kritis kepada kelompok penyaji lain menggunakan formulir umpan balik terstandar; berpartisipasi dalam refleksi akhir semester MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi publik: kelompok mendemonstrasikan luaran proyek di hadapan seluruh kelas sebagai audiens, melatih kemampuan komunikasi ilmiah, argumentasi kritis, dan responsivitas sebagai kompetensi technopreneur	di ruang kelas MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa menyelesaikan siklus penuh proyek inovasi dari perancangan hingga penyajian publik, mengkonsolidasi seluruh capaian pembelajaran semester dalam satu presentasi komprehensif Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			komponen penilaian UAS akhir semester	antikorupsi yang beretika Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Setiap kelompok mempresentasikan proposal inovasi final di hadapan kelas. Presentasi wajib mencakup: latar belakang masalah dan data pendukung, konsep dan fitur inovasi, demonstrasi prototipe/wireframe, rencana implementasi adaptif KTI, dan analisis dampak inovasi terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Nilai ICHSA-N terwujud secara terintegrasi: Integrity dalam kejujuran akademik penyajian, Creativity dalam orisinalitas solusi, Harmony dalam kerja tim, Service dalam orientasi publik, Adaptability dalam kontekstualisasi KTI, dan Nationalism dalam semangat kebangsaan memberantas korupsi.			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Mahasiswa juga mengisi formulir umpan balik tertulis untuk minimal satu kelompok penyaji lain. Deliverable: Tidak ada dokumen baru yang dikumpulkan pasca-presentasi; penilaian didasarkan pada: (1) kualitas presentasi lisan dan demonstrasi prototipe yang telah dilakukan di kelas, dan (2) formulir umpan balik tertulis untuk kelompok lain yang diserahkan kepada dosen di akhir sesi			
16		Mahasiswa mampu: Menyelesaikan seluruh kewajiban akademik akhir semester termasuk pengumpulan komponen penilaian yang belum diselesaikan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Akhir Semester (UAS) tertulis bila dijadwalkan oleh institusi: mencakup seluruh bahan kajian semester dengan penekanan pada	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi evaluasi dan penutupan semester: (1) pelaksanaan UAS tertulis bila dijadwalkan institusi, atau sesi tanya jawab konsolidasi materi (sesuai kebijakan institusi UNISAN), (2) pemberian umpan balik umum atas capaian kelas secara	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan esai refleksi individu dan formulir umpan balik akhir perkuliahan ke LMS; menutup seluruh kanal pengumpulan tugas semester sesuai tenggat yang telah ditetapkan; mengunggah informasi mekanisme pengumuman	Bahan Kajian: - Nilai integritas, kejujuran, dan keberanian antikorupsi; - Etika pemerintahan dan komitmen Pancasila; - Konsep dasar dan tipologi korupsi (konsolidasi seluruh	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Merefleksikan perkembangan pemahaman dan sikap antikorupsi pribadi sepanjang semester secara jujur dan kritis • Menginternalisasi komitmen integritas sebagai landasan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pasca perkuliahan	kemampuan analisis kasus korupsi (C4), evaluasi kebijakan antikorupsi (C5), dan penilaian rancangan inovasi (C6); format dan waktu mengikuti jadwal resmi institusi UNISAN Partisipasi kelas & laboratorium: Kehadiran dan partisipasi aktif dalam sesi evaluasi dan refleksi akhir; keterbukaan dan kejujuran dalam mengungkapkan refleksi capaian belajar pribadi sebagai wujud nilai Integrity Tugas:	keseluruhan sepanjang semester, (3) sesi refleksi penutup: mahasiswa secara sukarela berbagi satu hal paling bermakna dari perkuliahan ini sebagai wujud internalisasi nilai Nationalism dan komitmen antikorupsi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengikuti UAS tertulis atau sesi konsolidasi; berpartisipasi dalam refleksi penutup; menyerahkan esai refleksi individu dalam format cetak bila dipersyaratkan institusi MP — Metode Pembelajaran: Reflective Learning dan evaluasi sumatif: mahasiswa mengintegrasikan seluruh capaian pembelajaran semester dalam UAS dan esai refleksi sebagai bukti	nilai akhir via SI-OBE UNISAN (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh panduan esai refleksi dari LMS; menyelesaikan dan mengunggah esai refleksi serta seluruh komponen tugas yang belum dikumpulkan; mengisi kuesioner umpan balik perkuliahan (student feedback) sebagai masukan perbaikan mata kuliah MP — Metode Pembelajaran: Reflective Learning: mahasiswa secara mandiri mengonsolidasi seluruh pengalaman belajar semester melalui penulisan esai refleksi yang mengintegrasikan konsep, analisis kasus, dan nilai-nilai antikorupsi yang telah	bahan kajian semester); Pustaka: Komisi Pemberantasan Korupsi (2021); Pope (2000); Klitgaard (1988); Rose-Ackerman dan Palifka (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Esai refleksi individu: minimum 500 kata, berisi refleksi kritis atas perkembangan pemahaman tentang korupsi dan antikorupsi, nilai-nilai yang diinternalisasi sepanjang semester, dan komitmen konkret antikorupsi yang akan diterapkan dalam kehidupan nyata; dikumpulkan via LMS pada hari UAS atau sesuai jadwal institusi	internalisasi kompetensi antikorupsi yang komprehensif Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menulis esai refleksi kritis yang merangkum perjalanan belajar sepanjang semester: dimulai dari pemahaman konsep dasar korupsi, analisis kasus nyata di KTI, eksplorasi kerangka hukum dan kelembagaan antikorupsi, hingga perancangan inovasi teknologi. Esai wajib memuat: (1) perkembangan pemahaman konseptual yang paling signifikan, (2) nilai ICHSA-N yang paling kuat diinternalisasi beserta alasannya, dan (3) minimal satu komitmen konkret antikorupsi yang akan diterapkan dalam kehidupan nyata sebagai	dipelajari Estimasi Waktu: PB 2×50' · PT 2×60' · KM 2×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wujud nilai Nationalism dan Integrity. Mahasiswa juga wajib mengisi kuesioner umpan balik perkuliahan. Deliverable: Esai refleksi individu dalam format PDF, minimum 500 kata, diunggah ke LMS; dan kuesioner umpan balik perkuliahan yang telah diisi, dikirimkan melalui tautan yang disediakan dosen di LMS			

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri, **P**=Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Kuis	20	
2	Analisis Kasus	15	
3	Kampanye Antikorupsi	15	
4	UTS	25	
5	UAS	25	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Kuis	Analisis Kasus	Kampanye Antikorupsi	UTS	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	20	—	—	7	—	27
Sub-CPMK2	—	8	—	6	—	14
Sub-CPMK3	—	7	—	6	—	13
Sub-CPMK4	—	—	—	6	—	6
Sub-CPMK5	—	—	8	—	9	17
Sub-CPMK6	—	—	7	—	—	7
Sub-CPMK7	—	—	—	—	8	8
Sub-CPMK8	—	—	—	—	8	8
Bobot Komponen (%)	20	15	15	25	25	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas:

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO			
	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK			
	PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1			
RENCANA TUGAS MAHASISWA				
MATA KULIAH	Pendidikan Anti Korupsi			
KODE	3KKFS202	sks	2	SEMESTER 2
DOSEN PENGAMPU	Hasan Bau, S.E., M.Si.			
METODE PENUGASAN				
JUDUL TUGAS				
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH				
DISKRIPSI TUGAS				
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)				

LANGKAH Pengerjaan Tugas	
Bentuk dan Format Luaran	
Indikator, Kreteria dan Bobot Penilaian	
Jadwal Pelaksanaan	
Lain-lain	
Daftar Rujukan	

5.1 Kuis

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.2 Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi
3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

5.3 Kampanye Antikorupsi

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kampanye Antikorupsi			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Keaktifan	Aktif & relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
2	Kualitas kontribusi	Ide bernas & menambah wawasan	Ide baik	Ide umum	Tidak berbobot
3	Menghargai pendapat	Menyimak & menanggapi santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi/abai
4	Tanggung jawab tugas	Selalu siap & tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
5	Etika & sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

5.4 UTS

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			

		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.5 UAS

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.